

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Wahid Foundation (yang dulu bernama Wahid Institute) didirikan oleh Gus Dur (Abdurrahman Wahid), Yenny Wahid, Greg Barton, dan Ahmad Suaedy pada September 2004. Perjuangan Wahid Foundation dalam memperjuangkan toleransi umat beragama di Indonesia bergerak dalam bentuk program-program rutin setiap tahun dalam bentuk aksi nyata di lapangan dan dalam bentuk laporan tahunan, program-program tersebut antara lain: Program Sekolah Damai, Program Desa Damai, Kampanye Salam Forum, dan Laporan Tahunan KBB (Kebebasan Beragama/Berkeyakinan). Peran Wahid Foundation dapat dijelaskan melalui teori sistem David Easton, yang menunjukkan bahwa civil society berfungsi sebagai pengawas dan penekan kebijakan terhadap pemerintah. Dengan peran ini, civil society membantu memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih baik dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan serta demokrasi.⁷²

Wahid Foundation menghadapi berbagai tantangan dalam perjuangannya untuk mempromosikan keadilan dan toleransi. Mereka sering dianggap sebagai kelompok liberal, meskipun tujuan mereka adalah untuk mempromosikan nilai-nilai positif. Untuk mengatasi tantangan ini, Wahid Foundation melakukan kerjasama dengan lembaga lokal agar sosialisasi lebih efektif. Namun, mereka juga mengalami

⁷² Muhtar Mas'ud dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 1993), 5.

kekurangan dukungan dari partai politik, yang sering tidak peduli dengan isu-isu keadilan yang diusung karena kurangnya kepedulian terhadap masalah-masalah tersebut. Selain itu, banyak aparat pemerintahan yang belum sepenuhnya menyadari hukum dan undang-undang mengenai kebebasan beragama dan keberagaman. Hambatan juga dihadapi oleh kelompok minoritas yang tidak diakui oleh kementerian agama dan pendidikan karena tidak ingin termasuk dalam enam agama yang diakui negara, padahal konstitusi dan keputusan Mahkamah Konstitusi tidak membedakan antara agama dan kepercayaan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian skripsi, sekiranya ada beberapa saran mengenai masa depan kebebasan beragama di Indonesia.

Pertama, toleransi umat bergama menjadi hal yang sangat penting di masyarakat multikultural, menghargai umat beragama lain menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang indah dan damai. Hal ini sesuai dengan dasar negara Indonesia, Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Pada dasarnya semua agama mengajarkan hal yang sama, sikap kasih sayang, tolong menolong, sikap menghormati kepada pemeluk agama lain, dan sikap rendah hati. Semua kembali lagi kepada diri kita masing-masing, jika kita ingin hidup bermasyarakat, kita harus siap menerima perbedaan latar belakang pemeluk agama orang lain.

Kedua, pemerintah harus lebih bersikap adil dalam menentukan kebijakan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, damai, dan tentram dalam merawat kemajemukan bangsa. Pemerintah harus menyadari bahwa di masyarakat yang luas terdapat banyak masyarakat lain yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan ini merupakan tugas utama pemerintah untuk sadar akan hal tersebut agar terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan nyaman.

Ketiga, pentingnya peran masyarakat sipil sebagai garda terdepan ketika pemerintah tidak sepenuhnya menjalankan fungsinya dalam memperjuangkan toleransi umat beragama dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

